



## Dikelola dengan Hati-hati dan Akuntabel, Utang Indonesia Relatif Kecil Di antara Negara G-20

**Jakarta, 14 Juli 2020** – Bank Dunia telah merilis laporan berjudul *International Debt Statistics (IDS) 2021* pada 12 Oktober 2020. Laporan ini berisi data dan analisis posisi utang negara di dunia dimana dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar, termasuk Indonesia.

Namun demikian, laporan perbandingan yang dimaksud **tidak menyertakan negara-negara maju** melainkan negara-negara dengan kategori berpendapatan kecil dan menengah, sehingga terlihat bahwa posisi Indonesia, masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,8% dari total ULN. **Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur (akuntabel).**

Pada paparan perbandingan tersebut, terlihat bahwa utang Indonesia di antara negara-negara tersebut terhitung besar karena **ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16**. Dengan ekonomi yang besar, **utang Pemerintah (tanpa BUMN dan swasta) relatif rendah**, yakni 29,8% di Desember 2019. Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan dalam beberapa artikel pemberitaan media kemarin, sebagian besar utang Pemerintahnya diatas 50%, sementara posisi Indonesia jauh di bawahnya.

Negara	Debt to GDP (%)
China	46.8
Brazil	76.5
India	68.3
Russia	13.5
Mexico	46.0
Turkey	30.4
Indonesia	29.8
Argentina	86.0
South	56.7
Thailand	41.2

Source: *tradingeconomics*

Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang LN Indonesia (SULNI), utang LN Indonesia terdiri dari ULN Pemerintah Pusat, BUMN dan Swasta. Posisi ULN Pemerintah Pusat hingga Desember 2019 sebesar USD199,88 miliar atau hanya 49% dari total ULN Indonesia. (Publikasi SULNI: <https://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Default.aspx>). Perlu diketahui bahwa data publikasi IDS Bank Dunia didasarkan pada data SULNI tersebut. Pemerintah berulang kali menjelaskan bahwa data ULN dalam SULNI dimaksud tidak hanya terdiri dari ULN Pemerintah, namun termasuk data ULN BI, BUMN, dan swasta.

Pemerintah terus berkoordinasi, dalam hal ini dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

\*\*\*

### Narahubung Media:

Rahayu Puspasari  
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi  
Kementerian Keuangan

☎ 021 3846663  
✉ [mediacenter@kemenkeu.go.id](mailto:mediacenter@kemenkeu.go.id)